



Analisis *Framing* Berita Melemahnya Demokrasi Indonesia Era Akhir Pemerintahan Jokowi 2024 pada Media Online Kompas.Id dan CNN Indonesia

Ester Permata Putri^{*1}, Augustin Mustika Chairil²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: esterpermata0@gmail.com, augustin.mustika.ilkom@upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-09 Keywords: <i>Framing Analysis;</i> <i>Gamson and Modigliani;</i> <i>Weakening Democracy;</i> <i>Jokowi's Leadership.</i>	This research discusses <i>Framing</i> analysis on online media Kompas.Id and CNN Indonesia. The news topic that is the object of this <i>Framing</i> research discusses the phenomenon of weakening Indonesian democracy in the final era of Jokowi's government in 2024. This research uses a constructivist paradigm approach and the analysis technique uses the <i>Framing</i> model analysis method. William A. Gamson and Andre. Modigliani. This tool explains how the media or news writers interpret a phenomenon or issue. Gamson and Modigliani's <i>Framing</i> model is understood as a set of central ideas supported by two important devices, namely the Frame Device and Reasoning Device. The Frame Device consists of Metaphors, Catchphrases, Exemplars, Visual Images, and then there is the Reasoning Device consisting of Roots, Appeals to Principle, Consequences. The results of this research show that Kompas.id and CNN Indonesia frame the same topic of events, namely the weakening of democracy, but in their news series Kompas.Idd and CNN Indonesia report from different angles and phenomena. The findings in this research by Kompas.Id not only highlight how criticism offended Jokowi but also framed Jokowi as president in responding to this phenomenon. Meanwhile, CNN Indonesia tends to prefer to report more from the critics' side. So Kompas.Id does not tend to report more or less from the side of the government or supporters of Jokowi, while CNN focuses more on phenomena that criticize the government.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-09 Kata kunci: <i>Analisi Framing;</i> <i>Gamson Dan Modigliani;</i> <i>Demokrasi Melemah;</i> <i>Kepemimpinan Jokowi.</i>	Penelitian ini membahas terkait analisis farming pada media Online Kompas.Id dan CNN Indonesia, Topik berita yang menjadi objek penelitian <i>Framing</i> ini membahas terkait fenomena melemahnya demokrasi indonesia era akhir pemerintahan Jokowi 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigman Konstruktivis dan teknik analisisnya menggunakan metode analisis <i>Framing</i> model Wiliam A. Gamson dan Andre. Modigliani. Perangkat ini menjelaskan bagaimana media atau penulis berita menginterpretasikan fenomena atau isu. <i>Framing</i> model Gamson dan Modigliani dipahami sebagai seperangkat Ide sentral yang didukung oleh dua perangkat penting yakni <i>Frame Device</i> dan <i>Reasoning Device</i> , <i>Frame Device</i> terdiri dari <i>Metaphors</i> , <i>Catchphrases</i> , <i>Exemplars</i> , <i>Visual Images</i> , Dan selanjutnya terdapat Reasoning Device terdiri dari <i>Roots</i> , <i>Appeals to Principle</i> , <i>Consequences</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa diantara Kompas.id dan CNN Indonesia membingkai satu topik peristiwa yang sama yakni melemahnya demokrasi, namun dalam rangkian beritanya Kompas.Idd dan CNN Indonesia memberitakan dari sisi dan fenomena yang berbeda. Temuan dalam penelitian ini kompas.Id tidak hanya menyoroti bagaiman kritik yang menyinggung Jokowi tapi juga membingkai dari sisi Jokowi sebagai presiden dalam menanggapi fenomena tersebut.Sedangkan CNN Indonesia cenderung lebih banyak memilih memberitakan dari sisi pengkritik. Sehingga Kompas.Id tidak banyak atau sedikit cenderung memberitakan dari sisi pemerintah atau pendukung Jokowi, sedangkan CNN lebih banyak menyoroti aksi fenomena yang mengkritik pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi 1998, demokrasi Indonesia telah dianggap sebagai salah satu yang paling sukses di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat tanda-tanda melemahnya yang mengkhawatirkan. Publik Virtua Research Institute (PVRI) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa indikator melemahnya demokrasi di

Indonesia yang dinilai berada pada titik bahaya (Miya, 2022). Regresi ini telah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan dan narasi bahwa Jokowi tak tergantikan yang disuarakan oleh kelompok pendukung Jokowi (Miya, 2022). Fenomena informasi ini tidak lepas dari peran media massa dalam mengemas berita

yang dapat membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi.

Isu melemahnya demokrasi ini menjadi perbincangan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2024. Presiden Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode, sehingga tahun 2024 menjadi tahun pesta demokrasi yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan pemimpin yang layak bagi masa depan Indonesia. Pemikir politik seperti John Locke dan Rousseau berpendapat bahwa demokrasi dalam pemilihan umum dapat menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang (Bachtiar, 2014). Fenomena ini tidak hanya mendapat kritik dari tokoh politik, tetapi juga dari kalangan akademisi. Mahasiswa, dosen, hingga profesor turut mengomentari aktivitas-aktivitas yang dianggap mencurigakan selama masa pra-pemilu, yang ditandai dengan munculnya Petisi Bulaksumur.

Kritik terhadap kekuasaan Jokowi dianggap sebagai salah satu penyebab melemahnya demokrasi selama masa pergantian kepemimpinan. Media, sebagai penyedia berita dan informasi, hampir selalu terlibat dalam proses konstruksi. Dalam buku *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, dijelaskan bahwa proses pembuatan berita politik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi visi, ideologi, dan idealisme, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebutuhan pasar dan realitas. Sebuah media, dalam mengkonstruksi atau menginterpretasi suatu isu, berusaha untuk menyajikan peristiwa tertentu dari sudut pandang yang berbeda (Hamad, I. 2004).

Setiap media memiliki karakteristik yang membedakannya dari media lain dalam mengemas berita. Konstruksi realitas politik yang dibentuk oleh media dapat dipengaruhi oleh sistem politik yang menjadikan media sebagai salah satu subsistemnya (Hamad, I. 2004). Menurut pandangan ekonomi politik media Moscow, kepentingan dalam konteks kapitalis tidak dapat dipisahkan dari sistem media. Teori ini mengidentifikasi tiga fase utama yang terjadi dalam pengembangan media: komodifikasi, spesialisasi, dan strukturalisasi. Di dalamnya, kepemilikan media dimanfaatkan untuk mencapai pencapaian atau keuntungan dalam berbagai bentuk (Wenerda, 2015).

Isu melemahnya demokrasi, akibat dugaan praktik politik dinasti yang menyoroti Presiden Joko Widodo, terdengar hingga luar negeri, hal ini

dibuktikan oleh beberapa media asing seperti Washington Post, The Economist, New York Times, dan lainnya yang ikut menerbitkan berita tentang fenomena atau isu yang sedang menjadi perdebatan masyarakat Indonesia. Dari kejadian tersebut menjadi hal yang menarik untuk di beritakan kembali oleh para awak media nasional, terkait isu yang dikritisi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia terdengar jauh hingga luar negeri, informasi berita yang dibingkai oleh media luar dapat dikemas lagi menjadi sebuah berita agar masyarakat Indonesia tahu dan menjadi kritis mengenai sistem pemerintahan Indonesia.

Media yang turut memberitakan bahwa media asing ikut menyoroti terkait sistem demokrasi yang mulai melemah salah satunya terdapat Kompas.Id dan CNN Indonesia. Media memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan menafsirkan berita, sehingga membantu merinci peristiwa politik yang sedang berlangsung (Rusadi, 2015). Kompas.Id dan CNN Indonesia adalah platform media berita yang mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari responden, menurut survei yang dilakukan oleh Reuters Institute dalam laporan Digital News Report 2023.

Dalam Eriyanto (2002) Gamson membagi perangkat *Framing* menjadi dua yakni, *Framing Device* (Perangkat *Framing*) Berhubungan langsung dengan bingkai dalam teks berita, termasuk penggunaan perumpamaan, kata, kalimat, gambar, atau grafik. Dan *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran): Berhubungan dengan pembenaran sebab akibat atau pandangan yang memudahkan masyarakat menerima pesan, seperti keterangan tempat, waktu, dan isi berita yang jelas.

Topik melemahnya demokrasi menjadi menarik diteliti karena topik ini menyoroti kepentingan sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi yang dahulunya menjadi cerminan kesempurnaan demokrasi karena Jokowi tidak memiliki latar belakang elit untuk menjadi seorang pemimpin, namun di akhir pemerintahannya sekarang Jokowi di duga sedang membangaun sebuah dinasti politik di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Framing* model Gamson dan Modigliani Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi" (2018), Zellatifanny & Mudjiyanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan

hanya menggambarkan variabel, keadaan, atau gejala secara apa adanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam. Penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran komprehensif dari suatu fenomena melalui kata-kata (Silalahi, 2009).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode Analisis *Framing* Gamson dan Modigliani. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana media massa membentuk persepsi dan pendapat publik tentang isu-isu tertentu melalui pengaturan dan pembingkai informasi. Teori ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk memilih sudut pandang atau "frame" tertentu ketika melaporkan isu, yang kemudian mempengaruhi pemahaman dan interpretasi publik terhadap informasi tersebut. Analisis *Framing* melihat wacana sebagai hasil konstruksi realitas sosial, sehingga penelitian ini termasuk dalam paradigma konstruktivis.

Gamson dan Modigliani mengidentifikasi frame sebagai cara bercerita atau rangkaian ide yang disusun untuk memberikan makna pada suatu peristiwa dalam konteks wacana tertentu. Pendekatan *Framing* digunakan untuk memahami cara pandang wartawan dalam menulis berita, termasuk apa yang ingin ditonjolkan, dihilangkan, atau diarahkan. Mereka menyebut cara pandang ini sebagai "kemasan" (package). Dalam melakukan analisis Gamson dan Modigliani membagi menjadi perangkat *Framing* menjadi dua, yakni terdapat *Framing Device*, dan Reasoning Devices.

Framing Device terdiri dari *Metaphors*: Menganalisis penggunaan kata kiasan dalam berita tentang kemunduran demokrasi. *Catchphrases*: Mengidentifikasi frasa menarik atau jargon yang digunakan. *Exemplars*: Menganalisis contoh, mitos, atau peristiwa masa lampau yang dihadirkan. *Depiction*: Menganalisis kosakata yang digunakan untuk melabeli isu. *Visual Images* menganalisis gambar atau ilustrasi yang digunakan.

Dalam Reasoning Device terdapat perangkat penalaran yang terdapat, *Roots* (Analisis kausal, sebab akibat) Peneliti menganalisis penyebab dan akibat yang muncul dari isi berita mengenai isu tersebut. *Appeals to Principle* (Premis dasar atau klaim moral) Peneliti mencari alasan pembenaran menggunakan logika dan prinsip moral untuk mendukung klaim kebenaran dalam membangun wacana tentang kemunduran demokrasi. *Consequences* (Konsekuensi) Tahap akhir dalam analisis *Framing* Gamson dan Modigliani. Peneliti mengkaji efek atau konsekuensi dari *Framing* tentang isu tertentu

dalam teks atau dialog media, yang dapat dipahami sebagai hasil akhir dari bingkai tersebut.

Dalam teknik analisis data, data disusun ke dalam kategori, dijabarkan menjadi unit-unit, disintesis, dan disusun pola untuk memilah hal penting yang akan dipelajari, sehingga memungkinkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2012:224).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Framing* ini dilakukan terhadap berita yang telah dimuat oleh Kompas.Id dan CNN Indonesia terkait melemahnya demokrasi Indonesia. Penyajian analisis disesuaikan dengan pemberitaan yang telah termuat di saat pra pemilu.

1. Analisis Framing Berita Kompas.id

a) Framing Berita Kompas Id

Judul : Politik Dinasti

2 Oktober 2023

Frame : Politik Dinasti Jokowi?	Reasoning Device (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Device (Perangkat Penalaran)
Metaphors "Ia bukan berdarah biru, tetapi darah segar" bagi PDI-P yang membarahi dan menerapkan ajaran Bung Karno.	Roots Namun, praktik "dinasti" terdapat pada bidang politik, tetapi berlainan pada era Reformasi karena sistem pemilihan yang terbuka dan langsung berbeda dengan sistem pemilihan berjenjang pada masa Orde Baru.
Catchphrases "Beri aku 101 pemuda, aku akan mengguncangkan dunia"	Appeals to Principles Jokowi itu sebetulnya bagian politik, kontribusinya yang dilakukan Bung Karno sejak Pembangunan Pertama Berencana.
Exemplars Ketika putranya giran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota agatan kolektif warga tentu tak lepas dari kepemimpinan sang ayah, presiden.	Consequences Namun, yang perlu diperhatikan adalah pembangunan yang akan dilanjutkan secara masif itu harus berdasar konstitusi, hukum dan keadilan, dan hak saat manusia.
Depictions PDI adalah partai anak muda yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama.	
Visual Images 1. Penggunaan gambar balitera yang diartinya terdapat kursi 2. Foto Kaesang menyampaikan pidato politiknya untuk pertama kalinya setelah diangkat sebagai ketua umum PSI 3. Foto Anvi Warman Adnan, profesor riset, julukan anarkh, asal politik BUKA	

Metaphors, penggunaan perumpamaan dalam teks berita memiliki arti mendalam. Dalam berita yang terbit pada 2 Oktober 2023 ini, Kalimat seperti "Ia bukan berdarah biru, tetapi darah segar" menggambarkan bahwa keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin tidak dipengaruhi oleh posisi kekuasaan atau keturunan, melainkan berasal dari masyarakat biasa yang naik menjadi pemimpin dari Partai PDI-P. *Catchphrases*, bentukan kata atau frasa dalam teks berita mencerminkan pemikiran atau semangat tertentu, seperti "beri aku 101 pemuda, aku akan mengguncangkan dunia", frasa ini ditambahkan untuk menggambarkan karakteristik optimis Kaesang sebagai pemimpin muda dalam PSI. *Exemplars*, mengaitkan fenomena Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wali kota dengan

kepemimpinan sang ayah Jokowi, menunjukkan keterlibatan keluarga dalam politik. *Depictions*, penggunaan kosakata leksikon seperti "partai anak muda yang sangat majemuk" dan "pengusaha muda yang sangat kreatif" memberi label pada PSI dan Kaesang sebagai sosok dinamis dan penuh semangat dalam politik. *Visual Images* dalam teks berita ini Kompas.id menyisipkan 3 foto yang mewakili apa yang tengah menjadi topik berita tersebut.

Roots, dari teks berita ini mengidentifikasi bahwa sistem pemilihan terbuka dan langsung pada era reformasi menjadi akar penyebab praktik dinasti politik, berbeda dengan sistem pemilihan berjenjang pada masa Orde Baru. *Appeals to Principles*, klaim moral dalam berita ini menekankan bahwa selama tindakan keluarga Jokowi sesuai dengan hukum dan tidak melanggar aturan, tidak dapat dianggap sebagai nepotisme ilegal. Prinsip ini mengaitkan dengan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Bung Karno. *Consequences*, efek dari *Framing* berita ini menyoroti potensi positif kepemimpinan Kaesang dalam PSI yang dapat membawa partai tersebut melewati ambang batas masuk parlemen. Konsekuensi dari "politik dinasti" dilihat sebagai kelanjutan politik yang sudah ada sejak Bung Karno, menekankan pentingnya kelanjutan pembangunan nasional dengan berlandaskan pada hukum.

Jokowi karena partisipasi Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 sebagai bagian dari keluarga Jokowi. Ini menyoroti praktik politik dinasti, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga, bukan berdasarkan meritokrasi, tetapi hubungan keluarga. *Exemplars*: Pesan Obama kepada Trump dan Putusan MK tentang Batas Usia Capres/Cawapres digunakan untuk menunjukkan pentingnya menjaga demokrasi dan kritik terhadap keikutsertaan Gibran. *Catchphrase*: "Selamat Datang Dinasti Jokowi" menangkap esensi kontroversi politik dinasti dengan Gibran dalam Pemilu 2024, dengan nada ironi terhadap keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga. *Depiction*: Gibran digambarkan sebagai simbol rekonsiliasi dan Penggunaan visual images untuk mendukung naratif berita tentang partisipasi Gibran dalam Pemilu 2024.

Roots: Menurut Bivitri, sistem pemerintahan yang rusak dipengaruhi oleh dinasti politik, menunjukkan bagaimana Gibran terlibat dalam Pemilu 2024 dengan pengaruh dari dinasti Jokowi. *Appeals to Principles*: Prinsip moral menyoroti kehendak berkuasa dan pengabaian prinsip meritokrasi dalam politik, terlihat dalam keikutsertaan Gibran. *Consequences*: Konsekuensi dari politik dinasti dapat merusak kesetaraan dan prinsip demokrasi, menyoroti dampak dari penggunaan kekuasaan politik secara tidak adil.

b) *Framing* Berita Kompas.Id

Judul: Menyeret MK Dibalik Politik Dinasti 26 Oktober 2023

Frame Central: Menyeret MK Dibalik Politik Dinasti	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing)	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Metaphors Hujan kritik terhadap dinasti Jokowi turun dengan deras akan-abur di. Namun, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, tak berenti.	Roots Namun, berita menegaskan ada keberanian dalam menuliskan kritik politik dinasti saat ini. Sebab, dinasti Jokowi menggunakan sistem yang rusak dan menambal kebocoran dengan menyeret Mahkamah Konstitusi (MK).
Catchphrases Episode bertitik "Selamat Datang Dinasti Jokowi" itu dipandu jurnalis senior harian Kompas, TV Agung Kristanto.	Appeals to Principles Jalan panjang yang ditempuh melalui MK, kata Takali, menunjukkan keberanian berkuasa dan menepati tekadnya dengan berlandaskan pada keadilan dan pengabdian prinsip meritokrasi.
Exemplars Ini adalah dengan jevasan Presiden Jokowi yang kerap dipaparkan ketika tuduhan dinasti politik muncul. Kepada wartawan di Hotel Kota Gelera Bandung, Selasa (14/10/2023), misalnya, Jokowi mengatakan isu dinasti akan berakibat ke pengadilan masyarakat. Hasil periksa bukan ditentukan oleh elite politik, melainkan rakyat.	Consequences Hal itu berakibat kepercayaan Gibran yang merupakan bagian pengawal di menteri, dibekas dalam pemerintahan di ruster dari Alan Tsagb Riru. Karena itu proses atau dugaan pelanggaran etika dan perilaku hukum konstitusi tetap perlu dipertah.
Depictions Bukan hanya itu, Rahi menyebut Gibran sebagai simbol rekonsiliasi. "Kamu mencari musuh yang bisa diterima semua pihak, jadi ini simbol rekonsiliasi," ujarnya.	
Visual Images	
1. Menggunakan foto penggabungan Gibran dan Mahkamah Konstitusi pada arakan teks berita.	
2. Foto Gibran dan Presiden saat melakukan penalaran pada Presiden 2024.	
3. Foto penangkapan 6 bocor yang menyeret pengawal dengan tulisan terusan nama Gibran di jalan Lelatu Alimunggo.	

Metaphors: Istilah "Hujan Kritik terhadap dinasti Jokowi" digunakan untuk menggambarkan banyaknya kritik terhadap

c) *Framing* Berita Kompas Id

Judul: Jokowi, dari Kesempurnaan Demokrasi Menuju Politik Dinasti 30 November 2023

Frame Central: Jokowi, dari Kesempurnaan Demokrasi Menuju Politik Dinasti	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing)	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Metaphors demokrasi Indonesia semakin sehat dan sempurna.	Roots Pertama, Jokowi adalah presiden pertama yang terpilih dari figur yang bukan ketua umum partai atau elite partai. Jokowi hanyalah kader biasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Catchphrases Pi, "Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa." (Milan Kundera)	Appeals to Principles Oleh karena itu, dengan terpilihnya Jokowi sebagai orang nomor satu di republik ini, kita sudah mengikuti jejak kultur demokrasi Amerika di mana presiden tidak harus dari ketua umum partai politik.
Exemplars Oleh karena itu, dengan terpilihnya Jokowi sebagai orang nomor satu di republik ini, kita sudah mengikuti jejak kultur demokrasi Amerika di mana presiden tidak harus dari ketua umum partai politik.	Consequences Namun, kini jalan menuju terbangunnya politik dinasti semakin terang dan dilakukannya dengan melanggar aturan main demokrasi yang dimula ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seorang yang telah berusia 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan catatan pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Depictions Suaranya kehidupan dan vitalitas demokrasi Terbangunnya dinasti politik.	
Visual Images Garibar, grafik foto yang berguna untuk mendukung atau menekankan pesan dalam berita secara keseluruhan.	

Metaphors: Pada 2014, Jokowi digambarkan membawa perbaikan demokrasi, ditandai dengan pemerintahan yang tidak

berasal dari elite parpol. Istilah "Dinasti Politik" muncul seiring masuknya anggota keluarga Jokowi, seperti Gibran dan Bobby, ke dunia politik. **Catchphrase:** Mengutip Milan Kundera, teks berita menekankan pentingnya ingatan kolektif untuk mencegah pengulangan kesalahan masa lalu, khususnya terkait pelanggaran HAM. **Exemplars:** Penulis mengaitkan sistem demokrasi Indonesia dengan AS, menunjukkan perbaikan citra demokrasi di Indonesia, seperti Obama yang mematahkan stereotip rasial di Amerika. **Depiction:** Jokowi awalnya dilabeli sebagai pembawa kesempurnaan demokrasi, namun kemunculan politik dinasti dianggap sebagai regresi demokrasi yang mengancam sistem pemerintahan Indonesia.

Roots: Awalnya demokrasi Indonesia dianggap sehat dengan terpilihnya Jokowi, namun terancam oleh politik dinasti dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, menandai kemunduran demokrasi. **Appeals to Principles:** Prinsip demokrasi menekankan pemimpin yang terpilih harus memperkuat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon, bukan hanya dari golongan elite. Politik dinasti bertentangan dengan prinsip demokrasi yang adil dan sehat. **Consequences:** Jika politik dinasti terus berkembang, demokrasi Indonesia akan melemah dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi serta lembaga negara akan berkurang.

d) **Framing Berita Kompas Id**
Judul: Ketika Demokrasi dan Politik Dinasti Jadi Sorotan di Bulaksumur
9 Desember 2023

Frame Central	Roots
Framing Device (Perangkat Framing)	Roots
Metaphors "Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti".	Hadis sebagai pemantik diskusi, pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Moctari, aktris hak asasi manusia, Fatma Mauliyanti, dan salah satu peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia.
Depictions Kokohnya "Politik Dinasti". "Kemunduran demokrasi".	Appeals to Principles Demokrasi hanya bisa memajukan bangsa adil. Orang yang kaya-kaya paling kecil harus keburukannya, katanya.
Exemplars Putusan itu membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam kontes Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.	Consequences Terikat polemik politik dinasti ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menewaskan tanggapan. Tanggapan Presiden dibacakan saat dia menyampaikan perintah itu pada 24 Oktober 2023, seperti yang juga ditayangkan Kompas TV.
Depictions "alumni UGM paling memalukan".	
Visual Images 1. Berita ini menyertakan foto suasana diskusi dan seminar yang digelar SEM UGM. 2. Foto mural bertema demokrasi yang dikaitkan terdapat koran persidangan lisan foto narasumber. 3. Foto kompleks DPR MDR. 4. Penggunaan gambar data penggunaan pulsat pendapat melalui telepon yang dilakukan oleh Lembaga Kompas. 5. Foto mural tentang kebebasan pendapat di kawasan gedung sate.	

Metaphors: "Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik

Dinasti" menggambarkan pemerintahan otoriter dengan kemunduran demokrasi dan hukum. "Politik dinasti yang kini jadi polemik publik" menunjukkan kekuasaan terkonsentrasi dalam keluarga, merusak demokrasi. **Catchphrases:** Frasa seperti "Kemunduran demokrasi" dan "Politik dinasti" mengkritik kondisi di mana demokrasi melemah dan kekuasaan berputar dalam lingkaran keluarga. **Exemplars:** "Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden" dan contoh seperti "Pelemahan KPK, tindakan represif aparat, pengesahan Omnibus Law, dan RUU KUHP" menggambarkan kemunduran demokrasi. **Depictions:** Diskusi dengan satir mengkritik pemerintahan, melabeli Jokowi sebagai "alumnus UGM paling memalukan", menggambarkan kepedulian mahasiswa terhadap demokrasi dan politik dinasti. **Visual Images** Penggunaan gambar mendukung isi berita.

Appeals to Principles: Fatia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan Zainal menyatakan dalam demokrasi, pilihan terbaik adalah memilih yang "kurang buruk". **Consequences:** Politik dinasti dan kurangnya pengawasan menyebabkan kemunduran demokrasi dan runtuhnya konstitusi. Masyarakat diberi kekuatan menjatuhkan sanksi melalui pemilu dengan tidak memilih partai atau kelas yang merusak demokrasi.

e) **Framing Berita Kompas Id**
Judul: Jelang Pemilu 2024, Kemosrotan Demokrasi Jadi Masalah.
21 Desember 2023

Frame Central	Roots
Framing Device (Perangkat Framing)	Roots
Metaphors "Pembunuhan demokrasi dilakukan begitu halus sehingga nyaris tidak terdeteksi. Masyarakat baru menyadari sekarang saat ada kemosrotan demokrasi." ujarnya.	P.7 Dengan bergesernya negara bukan menjadi negara kekuasaan, terjadi praktik-praktik pelanggaran yang merugikan masyarakat. Misalnya
Catchphrases "Kemunduran demokrasi dilakukan begitu halus sehingga nyaris tidak terdeteksi. Masyarakat baru menyadari sekarang saat ada kemosrotan demokrasi." ujarnya. Menurut Sukidi	Appeals to Principles Titik kesadaran muncul setelah masyarakat melihat adanya manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai Sukidi sebagai skandal terbesar Indonesia.
Exemplars Titik kesadaran muncul setelah masyarakat melihat adanya manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai Sukidi sebagai skandal terbesar Indonesia.	Consequences Jelang Pemilu 2024, Indonesia menghadapi sejumlah masalah serius, seperti kemiskinan, merosotnya demokrasi, serta lemahnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Depictions Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanorejo memimpin diskusi Satu Meja The Forum Special Pemilu episode Memeraba Indonesia yang ditayangkan Kompas TV. Ratu.	
Visual Images Gambar, grafik foto yang berguna untuk mendukung atau menelakan pesan dalam berita secara keseluruhan.	

Metaphors: "Pembunuhan demokrasi" menggambarkan demokrasi yang rusak parah dan "Negara kekuasaan" menunjukkan negara yang dikendalikan oleh

kepentingan tertentu. *Catchphrases*: "Kemerostan demokrasi" mengaitkan masalah demokrasi dengan kondisi saat ini, dan "Praktik politik kemunafikan" menggambarkan ketidakjujuran politik. *Exemplars*: Contoh konkret seperti "Kasus manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)" terkait batas usia capres dan cawapres yang menguntungkan politik tertentu, dan data "Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan" yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan terkait masalah hukum. *Depictions*: "Diskusi Satu Meja The Forum" menggambarkan diskusi serius tentang masalah Indonesia dengan narasumber ahli, dan "Praktik pelanggaran hukum" menunjukkan perubahan negara hukum menjadi negara kekuasaan yang berdampak negatif. *Visual Images* menggunakan foto dari tangkap layar dari acara televisi terkait bincang kemerostan demokrasi

Roots: Akar masalah adalah "Praktik politik kemunafikan" dan "Pembunuhan demokrasi" yang dilakukan secara sistematis oleh aktor politik berkuasa. *Appeals to Principles*: Mengajak masyarakat untuk sadar dalam pemilu sebagai momen koreksi sosial, menekankan keadilan hukum dan transparansi, serta menolak manipulasi hukum yang merugikan demokrasi. *Consequences*: "Kemerostan demokrasi" menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan, "Kemiskinan" akibat buruknya penegakan hukum dan korupsi, dan "Eksploitasi sumber daya alam" menciptakan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan baru.

f) *Framing* Berita Kompas Id

Judul: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara.
24 Januari 2024

Frame Central	Meaning Device (Perangkat Penalaran)
<i>Framing Device (Perangkat Framing)</i>	<i>Meaning Device (Perangkat Penalaran)</i>
<i>Metaphors</i> Tidak ada	<i>Roots</i> Dia juga memberi contoh. Apabila seorang pesiden ingin maju kembali ke kontestan, sebagai petalana, presiden boleh mengorganisasikan dirinya sendiri.
<i>Catchphrases</i> Presiden Joko Widodo menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Soal apakah akan melakukannya atau tidak tergantung masing-masing individu.	<i>Appeals to Principles</i> Namun, lanjut Chico, dalam situasi tersebut, ada ruang etika yang perlu dipertahankan. Apalagi, dalam Pilpres 2024 ini, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, ikut dalam kontestan.
<i>Exemplars</i> Prasno-Mahfud MD, Chico Hakim, mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye.	<i>Consequences</i> (Hal) yang paling penting, presiden itu boleh lah kampanye, presiden itu boleh lah memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
<i>Depictions</i> "Ini ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Maukah gitu enggak boleh berpolitik." Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya. <i>Visual Images</i> Gerebar, grafik foto yang berguna untuk mendukung atau menekankan pesan dalam berita secara keseluruhan.	

Metaphors: Tidak ada penggunaan metafora dalam berita ini; informasi disampaikan secara langsung. *Catchphrases*: "Presiden boleh kampanye, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara" dan "Hak demokrasi, hak politik setiap orang" menegaskan bahwa pejabat boleh berpolitik tanpa memakai fasilitas negara. *Exemplars*: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebut oleh Chico Hakim sebagai dasar legalitas presiden berkampanye. Mahfud MD mencontohkan etika dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara dalam kampanye. *Depictions*: Jokowi digambarkan sebagai pemimpin yang taat hukum dan Mahfud MD sebagai pejabat beretika, tidak memanfaatkan fasilitas negara. *Visual Images*: Kompas.Id mendukung berita dengan dokumentasi.

Roots: UU yang membolehkan pejabat publik berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara adalah dasar argumen ini. *Appeals to Principles*: Prinsip demokrasi dan hak politik ditegaskan oleh Jokowi, menekankan bahwa pejabat boleh berkampanye asalkan etis. Mahfud MD dan Chico Hakim menyoroti pentingnya etika dalam berpolitik. *Consequences*: Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye tidak diperbolehkan dan juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jokowi menekankan integritas kampanye tanpa fasilitas negara. Chico Hakim menyatakan bahwa keterlibatan keluarga dalam kampanye bisa mempengaruhi persepsi publik dan menimbulkan anggapan negatif. Analisis *Framing* model Gamson dan Modigliani menunjukkan bahwa berita ini menekankan hak politik presiden dan menteri, pentingnya etika dalam politik, dan potensi pengaruh negatif dari keterlibatan keluarga dalam kampanye.

g) *Framing* Berita Kompas Id
Judul: Jelang Pemilu 2024, Kemosrotan Demokrasi Jadi Masalah
30 Januari 2024

Framing Central politik	Reinforcing Devices (Perangkat Penguatan)
Framing Device (Perangkat Framing) Metaphors Tidak ada	Roots Tentara yang berpihak secara politik merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang sudah diperbaiki sejak era Reformasi.
Catchphrases Gendai tak bisa dilepaskan dari manuver politik Jokowi.	Appeals to Principles "Saya kira, akhirnya dibutuhkan kesadaran Presiden sebagai seorang pemimpin, kepada negara, bangsa, bangsa, untuk berpihak kepada semua kalangan dan tidak mengganggu jalannya profesionalitas".
Exemplars Firman menjelaskan, secara historis, Akmil sebagai bagian dari TNI merupakan lembaga yang salah dipikahi untuk menjadi institusi profesional dan netral.	Consequences Menurut Bagja, kegiatan Presiden Jokowi yang dianggap Prabowo ke beberapa daerah pada masa kampanye sulit dikategorikan melanggar Pasal 282 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Depictions "Selain acara di Akmil Napalang, Presiden Jokowi sempat pula menghadiri penyerahan secara simbolis pesawat C-130J Super Hercules kebagian dari Mishan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Hilmal Haragya Foto kebersamaan Jokowi dan Prabowo	

Metaphors: Berita tidak menggunakan metafora eksplisit, tetapi "momen kebersamaan" menggambarkan harmoni antara dua tokoh politik yang biasanya rival. **Catchphrases:** "Manuver politik" menunjukkan kebersamaan Jokowi dan Prabowo sebagai tindakan politik. "Elemen-elemen yang seharusnya tidak perlu disentuh" menekankan bahwa politik seharusnya tidak mengganggu lembaga profesional seperti Akmil. **Exemplars:** Firman Noor dari BRIN menyebut kebersamaan Jokowi dan Prabowo sebagai gangguan terhadap profesionalitas militer. Peresmian Graha Utama Akmil dan penyerahan pesawat C-130J Super Hercules dicontohkan sebagai kegiatan resmi yang dianggap politis. **Depictions:** Berita menggambarkan kebersamaan Jokowi dan Prabowo dalam acara formal seperti peresmian dan makan bakso bersama, tetapi dikaitkan dengan agenda politik lebih besar. Gambar interaksi mereka memperkuat kesan bahwa ini lebih dari kegiatan pemerintahan biasa.

Roots: Kritik berakar dari sejarah kelam politik militer Indonesia, di mana tentara yang berpihak secara politik menjadi masalah yang telah diperbaiki sejak era Reformasi, sehingga momen kebersamaan ini dianggap berisiko. **Appeals to Principles:** Firman Noor dan narasumber lain menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas lembaga militer serta demokrasi dan kesetaraan dalam pemilu, sebagai alasan mengapa tindakan Jokowi dianggap tidak sesuai. **Consequences:** Potensi ketidakseimbangan dalam Pilpres 2024 diuraikan sebagai konsekuensi dari tindakan Jokowi, yang dapat mem-

pengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Perpindahan pilihan pemilih, terutama dari kelas menengah atas dan terdidik, disebut sebagai kemungkinan akibat jika ketidakseimbangan ini berlanjut.

h) *Framing* Berita Kompas Id
Judul: Media Asing Soroti Rekam Jejak Prabowo dan Jokowi
14 Januari 2024

Framing Central: Media Asing Soroti Rekam Jejak Prabowo dan Jokowi	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reinforcing Device (Perangkat Penguatan)
Metaphors Tidak ada	Roots Faktor lain adalah Prabowo mengubah citra dari sosok meledak-ledak menjadi kakek menggemaskan.
Catchphrases Berbagai media massa luar negeri memberikan potensi kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.	Appeals to Principles Selama ini, Indonesia telah mengpertahankan posisi netral dalam kebijakan luar negerinya dan berupaya menjalin hubungan dengan AS, Australia, dan China.
Exemplars Dari Amerika Serikat, majalah Time mengangkat soal masa lalu Prabowo. Majalah itu menulis, Prabowo pernah dilarang masuk AS sebab ia pernah dituntut terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).	Consequences "Seluruh kampanye Prabowo ditatarakan pada gagasan yang sama dan bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
Depictions Berbagai media massa luar negeri memberikan potensi kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Visual Images Foto Tangkapan layar dari media berita yang memberikan kemunduran demokrasi	

Metaphors: Teks tidak banyak menggunakan metafora, namun frasa "kakek menggemaskan" menggambarkan Prabowo dengan cara yang lebih positif. **Catchphrases:** "Keunggulan Prabowo-Gibran" sering disebut untuk menunjukkan dominasi dan kepastian kemenangan. "Dinasti politik" menyoroti keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik dengan nuansa negatif. **Exemplars:** Majalah Time mengangkat masa lalu Prabowo terkait pelanggaran HAM, dan Associated Press mengaitkannya dengan pemerintahan Soeharto. **Depictions:** Media seperti BBC, Al Jazeera, dan The Straits Times melaporkan langsung tentang keunggulan Prabowo-Gibran, menggambarkan suasana kemenangan. Voice of America menunjukkan pengaruh besar Jokowi dalam kemenangan Prabowo.

Roots Artikel menyoroti popularitas Prabowo yang terkait dengan Jokowi dan perubahan citranya, serta dugaan pelanggaran HAM dan hubungan dengan Soeharto. **Appeals to Principles:** Demokrasi dan keadilan ditekankan sebagai prinsip utama dalam pemilu ini, dengan pentingnya pemilu yang bebas dan adil. **Consequences** Potensi dampak kemenangan Prabowo-Gibran terhadap kebijakan luar negeri dan proyek infrastruktur Jokowi, serta kemungkinan pembentukan dinasti politik yang bisa mempengaruhi demokrasi di Indonesia.

2. Analisis Framing Berita CNN Indonesia

a) Framing Berita CNN Indonesia

Judul : MK Dinilai Teguhkan Politik Dinasti
Jika Kabulkan Usia Capres-Cawapres
16 Oktober 2023

Frame Central	Counting Device (Perangkat Penalaran)
Metaphors Pengantar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jendra Bivtri Susanti menilai Mahkamah Konstitusi (MK) akan meneguhkan politik dinasti apabila mengabdikan gugatan terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dari 40 tahun menjadi 35 tahun.	Roots Bivtri berupaya menjelaskan kemunduran tiga jenis putusan yang diambil MK. Pertama, yaitu menolak gugatan atas batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun.
Catchphrases Pertama dia meneguhkan politik dinasti yang bahkan sudah jauh lebih parah dari zaman Soeharto." ujar Bivtri dalam webinar bertajuk "Ancaman Politik Dinasti Menjelang Pemilu 2024", Minggu (13/10).	Appeals to Principles Belakangan ini, kata Bivtri, MK mulai tidak konsisten. Pihaknya adalah putusan yang terkait masa jabatan pengisian KPR empat tahun menjadi lima tahun. Ia menyoroti argumentasi hakim MK di balik putusan itu.
Exemplars Pertama dia meneguhkan politik dinasti yang bahkan sudah jauh lebih parah dari zaman Soeharto." ujar Bivtri dalam webinar bertajuk "Ancaman Politik Dinasti Menjelang Pemilu 2024", Minggu (13/10).	Consequences MK saat ini sedang menanggapi gugatan tentang batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu. Ada gugatan yang meminta batas usia capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ada pula gugatan yang meminta batas akhir usia capres dan cawapres 70 tahun.
Depictions Bivtri menilai lembaga peradilan di zaman Presiden Soeharto tidak netral.	
Visual Images Foto Bivtri kritik MK, awal luncuran usia	

Metaphors: "Meneguhkan politik dinasti" menggambarkan keputusan MK yang memperkuat struktur politik keluarga, mirip monarki. "Regresi demokrasi" menandakan kemunduran sistem demokrasi Indonesia akibat keputusan MK. **Catchphrases:** "Politik dinasti" sering muncul untuk mengkritik kecenderungan politik keluarga dalam pemerintahan. "Ancaman politik dinasti" menyoroti dampak negatifnya terhadap demokrasi. **Exemplars:** Era Soeharto digunakan sebagai contoh historis untuk menunjukkan situasi politik saat ini lebih buruk. Kasus KPK menunjukkan inkonsistensi hukum MK. **Depictions:** Bivtri Susanti digambarkan sebagai kritikus yang berani dan kredibel. Lembaga peradilan di era Soeharto digambarkan tidak netral tapi tidak seberat nepotisme saat ini.

Roots: Akar masalah adalah kekhawatiran bahwa keputusan MK tentang batas usia capres-cawapres memperkuat politik dinasti, merusak demokrasi, dan menunjukkan ketidakpastian dalam peradilan. **Appeals to Principles:** Prinsip demokrasi dan keadilan menjadi landasan kritik terhadap MK, menunjukkan bagaimana keputusan MK merusak integritas demokrasi. **Consequences:** Keputusan MK mendukung politik dinasti, mengakibatkan kemunduran dalam demokratisasi Indonesia dan juga ancaman terhadap pemerintahan yang adil dan tidak bias.

b) Framing Berita CNN Indonesia

Judul: Runtuhnya Legitimasi MK di Tengah Bayang-bayang Politik Dinasti
17 Oktober 2023

Frame Central	Counting Device (Perangkat Penalaran)
Metaphors Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan 'karpet merah' kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat putusan asal gugatan.	Roots Kemarin, MK mengabdikan sebagian permasalahannya perkara nomor: 80/PDS-DK/2023 dengan menyatakan Pasal 169 huruf e UU Pemilu 7/2017 asal syarat usia capres dan cawapres.
Catchphrases Pilar itu kini berubah jadi "the guardian of family," ujar Castro saat ditubangi. Selasa (17/10).	Appeals to Principles "Tentu putusan itu berdampak besar. Akan terjadi krisis legitimasi terhadap putusan-putusan MK berikutnya, termasuk putusan sengketa pemilu 2024 nanti."
Exemplars Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CAL5) Herdiansyah Hamzah 'Castro' melancarkan perjaga keluarga.	Consequences Putusan MK yang mengabdikan pemrosesan syarat capres-cawapres ini tidak hanya menandakan kepercayaan publik terhadap MK, tapi juga merobohkan pilar lembaga sebagai the guardian of constitution. Pilar itu kini berubah jadi the guardian of family," ujar Castro saat ditubangi. Selasa (17/10).
Depictions Penggunaan foto gedung Mahkamah Konstitusi yang terlihat gagah namun banyak kecurangan di dalamnya.	

Metaphors: "Karpet merah" menggambarkan langkah Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dengan bantuan putusan MK. "Penjaga keluarga" menggambarkan MK yang dianggap lebih melindungi kepentingan keluarga ketua MK Anwar Usman daripada menjaga konstitusi. **Catchphrases:** "The guardian of family" digunakan untuk menggambarkan MK yang seharusnya menjaga konstitusi namun dianggap lebih memprioritaskan kepentingan keluarga ketua MK. "Mahkamah keluarga" mengandung unsur ejekan menggambarkan MK sebagai lembaga yang dikendalikan oleh kepentingan keluarga, bukan sebagai institusi independen yang menjaga konstitusi. **Exemplars:** Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa MK telah kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. Bivtri Susanti mengkritik MK dengan istilah 'Mahkamah Keluarga' dan 'Pamanku dari MK'.

Roots: Masalah akar yang diidentifikasi adalah konflik kepentingan dalam putusan MK yang melibatkan keluarga ketua MK, serta penurunan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. **Appeals to Principles:** Prinsip keadilan dan integritas konstitusi yang seharusnya dijaga oleh MK dilanggar oleh pengaruh politik dinasti. Prinsip transparansi dan independensi dalam seleksi hakim MK diusulkan sebagai solusi jangka panjang. **Consequences:** Putusan MK yang mengakomodasi kepentingan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 berpotensi menyebabkan krisis legitimasi

terhadap putusan-putusan MK berikutnya. Bahaya krisis legitimasi Pemilu 2024 jika MK tidak melakukan reformasi yang diperlukan.

- c) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024
5 November 2023

Frase Sentral	Framing Device (Perangkat Framing)	Resonating Devices (Perangkat Penalaran)
Metaphors Dia menyinggung Indonesia yang mengadopsi sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal	Metaphors Dia menyinggung Indonesia yang mengadopsi sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal	Roots Mak, kita ini budaya politikya masih feodal, institusinya masih lemah, masih tergantung figur ini problem kita," jelasnya.
Catchphrases Mak, kita ini budaya politikya masih feodal.	Catchphrases Mak, kita ini budaya politikya masih feodal.	Appeals to Principles Seharusnya kata Jimly kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melawan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik.
Exemplars "Tu bangsa bentuk kerajaan negaranya tapi perilaku politiknya republik, mak, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilaku republik sehingga masih lagi anda berubah jadi republik."	Exemplars "Tu bangsa bentuk kerajaan negaranya tapi perilaku politiknya republik, mak, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilaku republik sehingga masih lagi anda berubah jadi republik."	Consequences Salah salah kepentingan institusi ini menjadi sumber sumbernya tindakan penyimpangan kekuasaan yaitu korupsi. Jadi tantangan bagi kita memberi dukungan pada capres untuk kita memberi masukan.
Depictions Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslimin-Indonesia (ICMI), Jimly Asshadiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024.	Depictions Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslimin-Indonesia (ICMI), Jimly Asshadiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024.	
Visual Images Foto Jimly mengkritik Prabowo	Visual Images Foto Jimly mengkritik Prabowo	

Metaphors: Frasa "Sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal" menggambarkan Indonesia sebagai negara republik namun perilaku politiknya masih mencerminkan struktur kekuasaan yang mirip dengan sistem feodal. **Catchphrases:** "Budaya politik feodal" adalah istilah untuk menggambarkan karakter politik yang terikat pada loyalitas personal dan pewarisan kekuasaan melalui hubungan keluarga, mirip dengan struktur hierarki dalam masyarakat feodal. **Exemplars:** Jimly mengkritik budaya politik dengan contoh Obama yang mendukung kampanye Hillary sebagai bentuk politik modern yang tidak terpengaruh oleh feodalisme. Sebaliknya, Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka menunjukkan praktik politik dinasti yang masih terjadi di Indonesia. **Depictions:** Jimly menggambarkan politik dinasti sebagai praktik feodal yang bertentangan dengan status resmi Indonesia sebagai republik. **Visual Images:** Foto Jimly saat menyinggung tentang dinasti politik

Roots: Akar masalah dalam berita ini adalah budaya politik dinasti dan feodal di Indonesia yang memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan struktur sosial-politik. **Appeals to Principles:** Prinsip objektivitas dan modernisasi budaya politik ditekankan oleh Jimly, yang menyarankan perlunya melihat fenomena politik dinasti secara objektif dan mempromosikan modernisasi dalam budaya politik. Prabowo membela

politik dinasti dengan alasan semangat patriotik dan pengabdian kepada negara. **Consequences:** Korupsi dan konflik kepentingan adalah konsekuensi dari budaya politik feodal, yang juga menghambat kemajuan politik di Indonesia menurut Jimly.

- d) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: KontraS Ragukan Pemilu 2024 Netral, Cawe-cawe Jokowi Jadi Indikasi
16 November 2023

Frase Sentral	Framing Device (Perangkat Framing)	Resonating Devices (Perangkat Penalaran)
Metaphors Salah satu faktornya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut cawe-cawe dalam gelaran Pemilu 2024	Metaphors Salah satu faktornya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut cawe-cawe dalam gelaran Pemilu 2024	Roots Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk beryak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," kata KontraS dalam keterangan tertulisnya. Ratu
Catchphrases KontraS juga menyinggung terkait netralitas aparat. Agarator Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK), mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada	Catchphrases KontraS juga menyinggung terkait netralitas aparat. Agarator Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK), mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada	Appeals to Principles Menurut KontraS, untuk mencegah tindakan pelanggaran kepatutan secara berlebihan dan tidak terukur, anggota di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar-standar internasional
Exemplars Perwakilan pun harus secara terus-menerus mengontrol pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.	Exemplars Perwakilan pun harus secara terus-menerus mengontrol pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.	Consequences Putusan MK menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres lebih di bawah 40 tahun, sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, Usai putusan itu keluar, Gibran yang masih berusia 36 tahun, itu pun bisa mendahului sebagai cawapres ke KPU.
Depictions Orbit cawe-cawe itu, mereka mendesak Jokowi bersikap netral pada Pemilu 2024. KontraS juga mendesak Jokowi untuk tidak menyebarkan kekhawatiran. Baik lewat pengumuman THR, Poli, SIN hingga ASN."	Depictions Orbit cawe-cawe itu, mereka mendesak Jokowi bersikap netral pada Pemilu 2024. KontraS juga mendesak Jokowi untuk tidak menyebarkan kekhawatiran. Baik lewat pengumuman THR, Poli, SIN hingga ASN."	
Visual Images Teks berita ini didukung dengan penggunaan foto presiden Jokowi menyapa relawan Gerakan Nusantara Bersatu	Visual Images Teks berita ini didukung dengan penggunaan foto presiden Jokowi menyapa relawan Gerakan Nusantara Bersatu	

Metaphors "Cawe-cawe" menggambarkan campur tangan Jokowi dalam pemilu sebagai tindakan tidak netral dan manipulatif. "Dinasti politik" menggambarkan upaya Jokowi membangun kekuasaan keluarga, menunjukkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. **Exemplars:** Kasus Anwar Usman menunjukkan pelanggaran etik dan intervensi dalam perubahan syarat usia capres-cawapres. Kematian ratusan petugas KPPS tahun 2019 menekankan pentingnya mencegah kekerasan dalam pemilu. **Depictions:** Pernyataan KontraS menunjukkan kekhawatiran terhadap ketidaknetralan pemilu dan mobilisasi ASN serta aparat keamanan. Tindakan Jokowi dalam menunjuk Pj Kepala Daerah dan mendukung Gibran sebagai cawapres dianggap sebagai campur tangan yang tidak netral.

Roots: Campur tangan presiden dan mobilisasi aparat keamanan serta ASN dianggap sebagai akar masalah ketidaknetralan pemilu. **Appeals to Principles:** Prinsip netralitas dan imparialitas ditekankan untuk memastikan keadilan dan demokrasi dalam pemilu. Prinsip HAM ditekankan untuk penanganan keamanan yang tidak melanggar hak-hak warga

negara. *Consequences*: Ketidaknetralan pemilu dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan terpilih. Pelanggaran HAM dapat memicu ketidakstabilan dan kerusuhan. Dinasti politik mengurangi peluang partisipasi yang adil bagi calon lain.

e) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: Panggung 'Bongkar' Kritik Politik Dinasti dan Desak Usut Kasus
10 Desember 2023

Frame Central	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing) Metaphors "Usman rayap" dan kecoa, yang bertaring tajam mengusuk "rumah Indonesia."	Roots Eti Seketani sebagai Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto mengkritik sikap koleganya, Sudiman Sudjatmiko yang seolah-olah meminta agar kasus pelanggaran HAM masa lalu diungkap dan fokus pada masa depan Indonesia.
Catchphrases "Kembalikan kawan kami. Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan." kata Petrus.	Appeals to Principles Melihat persoalan tersebut, Faisal meminta masyarakat tidak diam dan melambungkan praktik terhadap korupsi dan politik dinasti. Tejuwono supaya supaya jajar-pilar negara tidak semakin rapuh dan rusak.
Exemplars Petrus yang duduk di kursi roda menyampaikan perasaannya soal sikap yang diadopsi Sudiman yang merupakan sahabatnya di masa aktivisme melawan Orde Baru.	Consequences Pada kesempatan ini, elemen masyarakat yang mengantisipasi. Alami defamasi Demokrasi Indonesia (ASDI) turut menyatakan etas poin pernyataan sikapnya jelang Pemilu 2024.
Depictions Kasus HAM tidak boleh dipendam," kata Petrus dalam orasinya di Panggung Rakyat bertajuk "Bongkar" di Stadion Madya Gedeora Bing Karno, Jakarta. Sabtu. Visual Images Dalam teks berita gambar yang ditampilkan sebagai pelengkap atau pendukung isi berita yakni menggunakan beberapa dokumentasi acara ASDI yang di selenggarakan di GRE.	

Metaphors: "Siluman Rayap-Kecoa" menggambarkan pihak yang membangun politik dinasti dan korupsi sebagai perusak bangsa. "Rumah Indonesia" melambangkan negara yang dirusak oleh korupsi. *Catchphrases*: Seruan "Kembalikan kawan kami. Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan." menyatukan berbagai isu ketidakadilan. "Panggung Rakyat 'Bongkaaar'" menggambarkan semangat perlawanan. *Exemplars*: Petrus Hariyanto, korban pelanggaran HAM dan mantan Sekjen PRD. Faisal Basri, ekonom yang mengkritik politik dinasti dan korupsi. Fajar Merah, putra Wiji Thukul, simbol perlawanan. *Depictions*: Panggung Rakyat "Bongkar" sebagai tempat aktivis dan musisi menyuarakan kritik. Usman Hamid, Fajar Merah, Inayah Wahid sebagai tokoh HAM dan keadilan.

Roots: Pelanggaran HAM masa lalu dan korupsi serta politik dinasti merusak fondasi negara. *Appeals to Principles*: Seruan untuk keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menuntaskan pelanggaran HAM dan menolak korupsi. *Consequences*: Ketidakstabilan dan potensi

keruntuhan negara akibat korupsi dan politik dinasti, serta masa depan yang tidak cerah tanpa penyelesaian pelanggaran HAM.

f) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye & Memihak, Bagaimana Aturannya?
24 Januari 2024

Frame Central	Resonating Device (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing) Metaphors Tidak ada	Roots Pernyataan Jokowi itu merangsang kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye selama Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar aturan.
Catchphrases "Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara."	Appeals to Principles Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wapres yang masih menjabat harus memenuhi prasyarat. Di antaranya harus cuti di luar tanggungan negara serta tak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.
Exemplars Namun begitu, kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta seluruh masyarakat mengikuti pilihannya.	Consequences Bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
Depictions Dia mengatakan, penulisan bagi presiden dan pejabat lainnya untuk mengikuti kampanye anggota keluarganya bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Visual Images Foto Jokowi Saat menanggapi pertanyaan Wartawan	

Metaphors: Teks ini tidak banyak menggunakan metafora. *Catchphrases*: Presiden Jokowi mengatakan, "Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak." *Exemplars*: Advokat Gugum Ridho Putra menyatakan bahwa kehadiran fisik pejabat dalam kampanye keluarga dapat menjadi "perintah non-verbal yang sangat kuat" kepada masyarakat. *Depictions*: Presiden dan pejabat terlibat dalam kampanye dalam konteks hukum dan aturan yang mengatur partisipasi mereka.

Roots: Akar masalahnya adalah perdebatan tentang interpretasi hukum mengenai partisipasi presiden dan pejabat dalam kampanye, seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi. *Appeals to Principles*: Argumentasi bahwa partisipasi presiden dalam kampanye tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi menurut UUD 1945, yang menekankan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. *Consequences*: Konsekuensi dari partisipasi presiden dan pejabat dalam kampanye terhadap proses demokrasi dan persepsi publik mengenai transparansi dan keadilan pemilu.

g) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: Media Asing Soroti 'Kampanye' Jokowi ke Prabowo, Dinilai Mirip di AS
03 Februari 2024

Frame Central	Resonating Devices (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing) Metaphors Kampanye 'gaya Obama'	Roots Di Indonesia, presiden mendukung kandidat dari partai politik yang berbeda dan kian tampak kontroversial.
Catchphrases Salam dua jari distoisikan sebagai dukungan ke Prabowo yang memiliki nomor urut 2 di pemilu.	Appeals to Principles Lelaki lanjut, Habiburokman mengatakan masalah utama bukan soal perbedaan keanggotaan partai antara Jokowi dan Prabowo.
Exemplars Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memberi tanda-tanda yang menunjukkan dukungan dia terhadap Prabowo.	Consequences Arihanj menjelaskan uraian dukungan Jokowi dalam lanskap politik Indonesia. Dia menilai meski kampanye Jokowi mirip dengan model AS, tetapi dukungan dia bertujuan untuk mempertahankan pengaruh politik dengan membangun dinasti politik melalui anaknya.
Depictions Mula dari diduga memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, makan bakso bersama Prabowo, hingga istri dia, Iriana, mengacungkan dua jari ke awak media. Visual Images Foto Jokowi sedang menyampaikan Pidato (Tangkapan layar video Youtube COP28)	

Metaphors: Metafora "gaya kampanye Obama" menggambarkan cara Jokowi mendukung Prabowo. "Salam dua jari" simbol dukungan menggambarkan hubungan Jokowi dan Prabowo. **Catchphrases:** "Salam Dua Jari" mengartikan dukungan terang-terangan Jokowi dan Ibu Iriana kepada pasangan Prabowo-Gibran. **Exemplars:** Dukungan Obama terhadap Hillary Clinton dan George W. Bush terhadap John McCain digunakan untuk membandingkan praktik politik serupa di Indonesia. **Depictions:** Gambaran visual Jokowi dan Prabowo makan bersama menunjukkan kedekatan mereka dalam konteks politik.

Roots: Akar dari praktik politik ini di Indonesia, di mana presiden mendukung kandidat dari partai politik yang berbeda, dianggap kontroversial. Perbandingan dengan praktik serupa di AS menekankan bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. **Consequences:** Tindakan Jokowi bisa menjadi preseden bagi presiden masa depan di Indonesia dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.

h) *Framing* Berita CNN Indonesia
Judul: HRWG: Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika
11 Februari 2023

Frame Central	Resonating Devices (Perangkat Penalaran)
Framing Device (Perangkat Framing) Metaphors politik dinasti dan tuna etika di Pilpres 2024.	Roots Khalisi menyatakan rezim Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran HAM dan secara sistematis melakukan korupsi politik termasuk kejahatan seksual.
Catchphrases Judul "Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika"	Appeals to Principles Koalisi menyimpulkan Jokowi telah gagal dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol).
Exemplars Seperti perubahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang mempermudah pemberian izin investasi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat.	Consequences Koalisi menyatakan rezim Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran HAM dan secara sistematis melakukan korupsi politik.
Depictions Pemerintahan Jokowi, lanjut Daniel, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan setelahnya, membuat sejumlah kebijakan berorientasi pasar yang justru merusak demokrasi. Visual Images Penggunaan ilustrasi pemungutan suara	

Metaphors: Istilah "politik dinasti" dan "tuna etika" digunakan untuk menggambarkan praktik politik yang tidak etis dan merugikan. **Catchphrases:** Slogan "Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika" menyerukan boikot terhadap calon presiden-wakil presiden tertentu untuk menolak praktik politik tidak etis. **Exemplars:** Contoh konkret seperti UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan proyek strategis nasional menunjukkan dampak negatif dari agenda otoritarian eksploitatif. **Depictions:** Kebijakan pemerintahan Jokowi digambarkan merugikan demokrasi, memperkaya elit, dan merugikan kelompok rentan, memberikan gambaran negatif tentang dampak kebijakan tersebut. **Visual Images:** Penggunaan ilustrasi pemungutan suara

Roots: Akar permasalahan dalam teks ini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap melanggar hak asasi dan mengeksploitasi situasi untuk kepentingan politik sempit. **Appeals to Principles:** Teks ini menyoroti pentingnya nilai-nilai demokrasi, HAM, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan dalam pemerintahan. **Consequences:** Menyoroti konsekuensi pelanggaran HAM, korupsi politik, dan penguatan agenda otoritarian eksploitatif yang memanfaatkan situasi pandemi dan pemilu.

3. Perbedaan Framing Detik.com dan Kompas.Id dan CNN Indonesia dalam Memberitakan Kemunduran Demokrasi

Berita yang dikemas oleh Kompas.id dan CNN Indonesia dalam menerbitkan isu melemahnya demokrasi di akhir kepemimpinan Jokowi, terpilih masing masing terdapat delapan objek teks berita, dengan judul, latar belakang dan peristiwa yang berbeda. Dari masing – masing berita yang telah dianalisis, peneliti menemukan perbedaan dalam pengemasan berita, perbedaan pengemasan berita ini dapat di pengaruhi oleh visi misi, ideologi, hingga ekonomi politik media yang menjadi pengaruh besar terkait bagaimana media mengemas berita. Pembingkai berita yang di publikasi oleh Kompas.Id terhadap fenomena isu melemahnya demokrasi indonesia. Dapat di deskripsikan bahwa berita kompas.id ditemukan memanadang fenomena dari berbagai sisi dan peristiwa, baik dari sisi sebagai Presiden Jokowi dalam menanggapi kritik masyarakat hingga masyarakat yang turut mengkritik pergerakan presiden Jokowi, kerluarga, hingga kebersamaan bersama salah satu paslon yang secara etik dibingkai kurang baik dilakukan, namun dari sudut pandang yang lain presiden melakukan aktivitas bersama paslon no urut 02 sebagai hubungan antara Presiden dan menteri pertahanan. Dari delapan berita di temukan terdapat tiga berita yang tidak menggunakan salah satu perangkat *Framing* Metaphors atau perumpamaan frasa, yang berguna untuk mengemas makna lebih dalam pada teks isi berita.

Sedangkan CNN Indonesia membingkai isu melemahnya demokrasi dengan menyoroti dari peristiwa yang sedang terjadi, dan juga meyoroti beberapa acara aksi kritik yang di ramaikan oleh aktivis ternama, serta kaula muda. Dalam bingkainya, ditemukan bahwa CNN Indonesia menggunakan perangkat *Framing* yang dapat mendukung penulisan berita. Penggunaan analogi, deskripsi, contoh, kata kunci sangat berpengaruh dalam membingkai peristiwa dengan memilih sisi apa yang ingin ditunjukkan agar pembaca dapat menunjukkan reaksinya dalam bentuk efek Afektif atau Behavioral akibat membaca berita tersebut, yang mengandung unsur komunikasi massa dari pihak media (Hadi, 2020)

Perbedaan atara penegmasan dan pengambilan topik berita yang di pilih oleh kompas.Id dan CNN Indonesia tetap kembali kepada bagaimana pemilihan realitas

konstruksi isu berita yang ingin di sampaikan oleh kedua media tersebut. Perbedaan pemilihan topik dapat terpengaruh oleh keadaan sistem ideologi, visi misi, hingga kebutuhan berita yang ingin dilihat oleh pembaca atau konsumen berita.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berita dari Kompas.id dan CNN Indonesia mengenai melemahnya demokrasi di akhir kepemimpinan Jokowi menunjukkan perbedaan dalam pengemasan berita. Kompas.id membahas isu ini dari berbagai sudut, termasuk tanggapan Jokowi terhadap kritik dan hubungan dengan paslon no. 02, meski tiga berita tidak menggunakan perangkat *Framing* seperti metafora. Namun kompas.id cukup banyak menggunakan pendukung gambar, dan kata kritik dalam judul yang dipulikasi dan dipilih oleh penulis.

Sementara itu, CNN Indonesia lebih menyoroti peristiwa aktual dan aksi kritik oleh aktivis, dengan menggunakan perangkat *Framing* seperti analogi dan deskripsi untuk membentuk reaksi pembaca. Perbedaan ini dipengaruhi oleh visi, misi, ideologi, dan ekonomi politik masing-masing media.

B. Saran

Dalam konteks penyajian berita, wartawan dan redaksi sebaiknya bersikap lebih objektif, menghindari keberpihakan atau melebih-lebihkan, serta bertanggung jawab dalam menulis. Berita harus mengikuti kode etik jurnalistik. Pemilihan narasumber perlu mencakup sudut pandang pro dan kontra untuk menampilkan argumen dan fakta secara seimbang. Masyarakat sebaiknya memeriksa kebenaran berita yang beredar untuk menghindari informasi palsu atau hoaks.

DAFTAR RUJUKAN

- Ana Maria, Sarmento Gaio, Mondry, Carmia Diahloka 2015 "ANALISIS *FRAMING* ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4
- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. 2009. Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Aryusmar, A. (2011). Karakteristik bahasa jurnalistik dan penerapannya pada media cetak. *Humaniora*, 2(2), 1209-1218.

- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. *KOMUNIKASI MASSA*.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Mulyana, D. D. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.
- Nur, E. (2021). Peran media massa dalam menghadapi serbuan media online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1).
- Pamuji, E (2019). *MEDIA CETAK VS MEDIA ONLINE (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa)*, Surabaya: Unitomo Press
- Rakhmat, J. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. *Online, diakses pada*, 15.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Rusadi, U. (2015). *Kajian media: Isu ideologis dalam perspektif, teori dan metode*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wicks, R. H. 2005. *Message Framing and Constructiong Meaning: An Emerging Paradigm in Mass Communication Research*. dalam P. J. Kalbfleisch, *Communication Yearbook 29* (pp. 333-360). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.